



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/626/VI.02/HK/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/82/VI.02/HK/2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 800.1.11/4803/VI.04/2024 atas nama Nurul Fajri, S.Sos.,M.T., NIP 19790311 199803 1 002 disamping tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota dan Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya serta bentuk *specimen* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Dr. MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M., NIP. 19801206 200212 1 010 pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- b. NURUL FAJRI, S.Sos., M.T., NIP. 19790311 199803 1 002 pangkat Pembina (IV/a), Jabatan (Plt.) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
- d. TRI HARNIANTY, S.E., M.M., NIP. 19810704 200804 2 001 pangkat Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.

- KEDUA : Pejabat yang dimaksud apabila berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang atau sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :
- a. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/6/VI.02/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
 - b. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/82/VI.02/HK/2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-9-2024
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

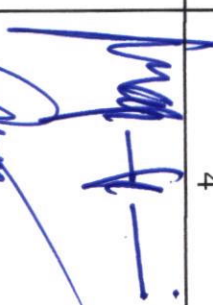
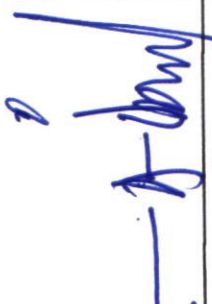




1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG


NOMOR : G/626/VI.02/HK/2024

TANGGAL : 28 - 9 - 2024

**SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	PARAF
1	Dr. MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M. NIP. 19801206 200212 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
2	NURUL FAJRI, S.Sos., M.T. NIP. 19790311 199803 1 002 Pembina (IV/a)	Plt. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
3	TRI HARNIANTY, S.E., M.M. NIP. 19810704 200804 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN